

Restitusi pajak sawit 'raib' Rp26 triliun

OLEH ANUGERAH PERKASA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Dugaan penyelewengan restitusi pajak tiga perusahaan besar kelapa sawit senilai Rp26 triliun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak.

Sekjen Asosiasi Pem-bayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadi Negoro mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak 2010 sebesar Rp700 triliun adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak. Oleh karena itu, KPK diminta menelusuri masalah tersebut.

"Salah satunya masalah adanya restitusi Rp40 triliun di mana sekitar Rp26 triliun adalah restitusi Ppn. Kebanyakan dari mereka adalah eksportir CPO (*crude palm oil*). Apakah benar mereka membeli bahan baku sekitar 10 kali lipat yakni Rp260 triliun?" ujarnya se usai menyampaikan laporan itu KPK bersama dengan Badan Pekerja tokoh lintas agama, di Jakarta pekan lalu.

Ditjen Pajak mendefinisikan restitusi pajak adalah mekanisme pembayaran kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak apabila

kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Tiga perusahaan CPO yang dilaporkan APPI ke KPK adalah AAG, PT PHS dan PT WNI.

Pada Desember 2010, BPK menyampaikan temuan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008).

"Salah satu penyebab tak tercapainya target pajak 2010 adalah penyelewengan restitusi"

Legitimasi

Ketua KPK

Busyro Muqoddas mengatakan laporan Badan Pekerja maupun masyarakat lainnya merupakan legitimasi terhadap KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Walaupun tidak secara spesifik, tetapi Busyro menuturkan kasus dugaan mafia pajak akan dirampungkan pada tahun ini.

"Komitmen kami jelas. Kasus mafia pajak akan dirampungkan pada tahun ini, walaupun sangat berat," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada pengaruh bagi KPK adanya lingkaran-lingkaran politik dalam penanganan kasus korupsi.